

Jurnal Konsorsium Solo
DEMOKRASI LOKAL

Volume I, Nomor 3, Mei 2012

Quovadis Musrenbang Kota Surakarta

Muhamad Amin, SS.

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagai
Bagian dari Potret Demokratisasi Lokal: Kajian atas
Proses Perencanaan dan Kinerja Pelayanan Publik
di Kota Surakarta

Drs. Mulyanto, ME.

Demokratisasi Lokal dalam Perspektif Perempuan:
Harapan dan Kenyataan

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.

Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Proses
Demokrasi Lokal di Kota Surakarta:

Sebuah Pengalaman Pendampingan Kelompok Perempuan
dalam Proses Musrenbang

Nurul Sutarti, S.P., M.Si.

Membaca Posisi Suara Masyarakat (Marginal) dalam
Demokrasi Lokal di Kota Surakarta

Akbarudin Arif, MA.



Jurnal Konsorsium Solo **DEMOKRASI LOKAL**

Volume I, Nomor 3, Mei 2012

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab:

Konsorsium Solo

Nurul Sutarti

Akbarudin Arif

Endang Listiani

Editor:

Endang Listiani

Alamat Redaksi:

Jl. Aster IV No.2 RT 02 RW 01 Timuran, Banjarsari,
Surakarta 57131

Telp/fax: 0271-720842

Email: konsorsiumsolo@soloku.org

www.soloku.org

Jurnal Konsorsium Solo
"Demokrasi Lokal"

© Konsorsium Solo

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan Pertama, Mei 2012

vi + 94 hlm; 15,5 x 23.5 cm

ISSN: -

Penanggungjawab:

Konsorsium Solo

Nurul Sutarti

Akbarudin Arif

Endang Listiani

Penulis:

Muhamad Amin, SS.,

Drs. Mulyanto, ME.,

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.,

Nurul Sutarti, S.P., M.Si.,

Akbarudin Arif, MA.

Editor:

Endang Listiani

Desain Cover: Tim Konsorsium Solo

Tata Letak: Tim Konsorsium Solo

Diterbitkan oleh

Konsorsium Solo

Jl. Aster IV No.2 RT 02 RW 01 Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131

Telp/fax: 0271-720842

Email: konsorsiumsolo@soloku.org

www.soloku.org

Pengantar Redaksi

Demokrasi lokal adalah demokrasi yang terjadi di level lebih bawah dari hierarki pemerintahan suatu negara. Demokrasi tingkat lokal berupaya mendekatkan alam bernegara kepada alam individu. Jarak, sebagai suatu hal yang kerap membuat warganegara punya *political efficacy* yang rendah, dipangkas oleh konsep ini. Oleh sebab itu, demokrasi lokal sering dipahami sebagai cara berdemokrasi di lembaga-lembaga pemerintahan lokal seperti walikota/bupati, dewan kota/kabupaten atau DPRD, komite-komite, pelayanan administrative, serta dalam pengorganisasian dan aktivitas masyarakat (civil society).

Dalam demokrasi lokal, kedua elemen, yaitu pemerintah dan civil society bekerja sama dalam melakukan penyusunan, implementasi kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi. Keduanya merupakan partner kerja, kendati di dalam kenyataannya seringkali keduanya lebih merupakan "*sparring enemy*". Peran serta masyarakat lokal adalah fondasi utama dalam demokrasi lokal, sebab lembaga-lembaga masyarakat yang ada beserta segala proses pengambilan keputusannya memungkinkan terwujudnya praktik demokrasi yang lebih langsung, yang di dalamnya suara individu dapat didengar dengan lebih mudah.

Salah satu media yang mendorong demokratisasi lokal adalah musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan *top-down*. Masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal memiliki tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek tak luput juga dari dilematika. Sudah 11 tahun musrenbang berjalan di Kota Surakarta, namun proses yang terjadi belum cukup mapan dan matang, bahkan ada indikasi kejenuhan pada masyarakat. Kejenuhan ini bisa disebabkan karena minimnya program masyarakat yang terealisasi pada pelaksanaan dan tidak ada inovasi penyelenggaraan Musrenbang. Musrenbang seakan-akan hanya menjadi formalitas media membangun demokratisasi lokal yang partisipatoris, namun pada kenyataannya semu.

Pada sisi lain, ada banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam Musrenbang. Secara garis besar persoalan yang dihadapi perempuan bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu: kultur, struktur, dan substansi. Secara kultur, budaya patriarkhi yang masih kuat menjadikan ruang gerak perempuan sangat terbatas. Dari aspek struktur, perempuan menjadi pihak yang diabaikan, kurang didengar, dan seringkali tidak diberi akses dalam pengambilan keputusan. Sementara dari substansi, para pelaku musrenbang masih minim dalam pemahaman keadilan gender. Kebijakan pengarusutamaan gender telah ada, namun realisasinya "mlempem". Hal inilah yang sering menyebabkan anggaran untuk perempuan, anak, dan lansia masih kecil dibandingkan anggaran lainnya.

Realita demokrasi lokal tersebut memerlukan pengawalan dan pendampingan dari masyarakat, baik itu LSM/CSO, pers lokal, intelektual/mahasiswa/kampus lokal, dan komunitas perempuan. Dengan demikian, otonomi daerah diharapkan dapat makin menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya lokal yang kompatibel dengan demokrasi dan mampu mendorong proses konsolidasi demokrasi lokal.

Melalui jurnal "*Memotret Proses dan Hasil Demokratisasi di Kota Surakarta: Refleksi dan Peluang Ke Depan*" Konsorsium Solo berupaya untuk memfasilitasi berbagai pihak dalam memberikan gambaran atas realita proses dan hasil perjalanan demokratisasi di Kota Surakarta. Dalam beberapa tulisan di Jurnal ini juga

telah berupaya memberikan gambaran analisis tentang peluang dan tantangan demokratisasi di Kota Surakarta dalam perspektif otonomi daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya jurnal ini. Kami menyadari jurnal ini perlu banyak disempurnakan. Namun kami berharap karya sederhana dari akademisi, jurnalis, aktivis perempuan, dan aktivis LSM ini mampu memberikan inspirasi dan pemetaan untuk mendorong peran strategis kelompok miskin, marginal, dan perempuan dalam proses demokratisasi lokal di masa depan.

Surakarta, Mei 2012

Endang Listiani
Presidium Konsorsium Solo

Daftar Isi

Susunan Redaksi	i
Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	vi

Quovadis Musrenbang Kota Surakarta

<i>Muhamad Amin, SS.</i>	1
--------------------------------	---

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagai Bagian dari Potret Demokratisasi Lokal: Kajian atas Proses Perencanaan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Surakarta

<i>Drs. Mulyanto, ME.</i>	11
---------------------------------	----

Demokratisasi Lokal dalam Perspektif Perempuan: Harapan dan Kenyataan

<i>Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.</i>	36
--	----

Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Proses Demokrasi Lokal di Kota Surakarta: Sebuah Pengalaman Pendampingan Kelompok Perempuan dalam Proses Musrenbang

<i>Nurul Sutarti, S.P., M.Si.</i>	49
---	----

Membaca Posisi Suara Masyarakat (Marginal) dalam Demokrasi Lokal Di Kota Surakarta

<i>Akbarudin Arif, MA.</i>	74
----------------------------------	----

Biografi Penulis	90
------------------------	----

REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI POTRET DEMOKRATISASI LOKAL: KAJIAN ATAS PROSES PERENCANAAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURAKARTA

Oleh: Drs. Mulyanto, ME.

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNS
Surakarta

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji aspek perencanaan dan aspek implementasi pelayanan publik di Kota Surakarta sebagai basis dalam melakukan reformasi birokrasi pada masa-masa mendatang. Isian kuesioner terbuka yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada saat Pelatihan Renstra-SKPD dan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas pelaksanaan program Millennium Development Goals (MDG's) di Kota Surakarta, dijadikan sarana untuk memotret pelaksanaan demokratisasi di tingkat lokal.

Dari sisi perencanaan dokumen (Renstra-SKPD) yang dibagi ke dalam 3 (tiga) tataran, telah ditemukan bahwa dari sisi aspek pemahaman dasar, sekitar 34,62% SKPD merasa kurangnya pemahaman terhadap permasalahan dokumen perencanaan. Dari aspek proses penyusunan dokumen, sekitar 17,91% SKPD merasa bahwa keterbatasan waktu dan anggaran menjadi kendala dalam penyusunan dokumen, sedang dari aspek pasca penyusunan dokumen, sekitar 43,75% SKPD merasa bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sering dikalahkan oleh kekuatan dari pejabat yang berpengaruh.

Dengan mengambil sampel di 5 (lima) kelurahan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik untuk pencapaian sasaran MDG's, telah ditemukan bahwa wilayah dengan tingkat kepuasan terbesar ada di Kelurahan Joyotakan, yang diikuti oleh Kelurahan Semangi,

Kelurahan Pajang, Kelurahan Keprabon, dan Kelurahan Sewu. Sementara kinerja sektoral yang mempunyai peringkat terbaik adalah sektor kesehatan, yang diikuti oleh sektor kemiskinan, sektor lingkungan, dan sektor pendidikan.

Kata Kunci: *Perencanaan, Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, Birokrasi*

I. PENDAHULUAN

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang diatur dalam UU No.32/2004 (pengganti UU No.22/1999) dan UU No.33/2004 (pengganti UU No.25/1999) idealnya akan membawa perubahan besar bagi daerah untuk ikut dan terlibat aktif dalam mengatur secara mandiri penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) yang menjadi urusannya, sekaligus disertai dengan usaha keras dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah tanpa menimbulkan beban yang berat bagi masyarakatnya.

Dalam konteks UU No.32/2004, pemerintahan daerah yang baik dan bijak, harus mampu menterjemahkan berbagai urusan/ kewenangan yang diberikan untuk ditata dan diatur ke dalam struktur organisasi yang ideal (baca: Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) dengan konsep "miskin struktur - kaya fungsi", dengan harapan agar tidak terjadi pemborosan anggaran publik (khususnya untuk belanja pegawai), sebagaimana yang dikehendaki dalam PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam kondisi yang demikian, maka konsep anggaran harus mengikuti pengaturan fungsi dan kewenangan daerah (*money follows functions*).

Dalam PP No. 41/2007, seluruh Pemda harus mampu mengatur kewenangan dan urusan yang dimiliki, agar tercipta suatu model birokrasi yang baik dan ideal yang bisa mendorong terjadinya proses pelayanan kepada publik yang semakin hari harus semakin baik. Koridor urusan berdasar PP tersebut dikerangkai dalam bentuk Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib harus mampu mewisadahi dan menjembatani pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi masyarakat

setempat sebagaimana yang diatur dalam PP No. 65/2005. Sementara, untuk pemenuhan Urusan Pilihan harus diwadahi dan dicari struktur organisasi perangkat daerah yang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, karena menjadi ciri khas sekaligus keunggulan daerah (*core competence*). Sinergi antara pemenuhan SPM dan penggalian keunggulan/potensi daerah, diharapkan bisa membawa kemajuan daerah dengan indikator semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dicerminkan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat, semakin meningkatnya pelayanan dan mutu bidang pendidikan, dan semakin maju dan tercapainya derajat kesehatan masyarakat.

Tulisan ini mencoba mengkaji gambaran pelaksanaan demokratisasi lokal di Kota Surakarta yang dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi masyarakat. Dari sisi pemerintah, akan dikaji hasil jajak pendapat yang terkait dengan masalah penyusunan dokumen Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2010-2015, yang dilaksanakan oleh penulis pada bulan September tahun 2010. Sementara dari sisi masyarakat akan dikaji hasil survei kinerja pelayanan publik atas pelaksanaan program-program yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Melenium (*Millennium Development Goals (MDG's)*) di Kota Surakarta yang dilaksanakan oleh Kemitraan untuk Integritas pada tahun 2012, yang mengambil sampel di 5 (lima) kelurahan yang mewakili 5 (lima) kecamatan di Kota Surakarta.

Dari kedua hasil tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar dalam melakukan tindakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sebagai bagian dari proses dan potret demokratisasi lokal di Kota Surakarta pada masa-masa mendatang. Kajian yang dilakukan oleh Kemitraan untuk Integritas pada tahun 2012, yang dikutip dalam tulisan ini diambil dari Draf Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Masyarakat Dalam Percepatan Pencapaian Target Pembangunan *Millennium Development Goals (MDG's)* di Kota Surakarta.

II. METODE PENELITIAN

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini menggunakan 2 (dua) kerangka sampel. Sampel pertama diambil dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta yang terdiri dari 53 pegawai yang hadir mengikuti pelatihan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) - SKPD Tahun 2010-2015, pada tanggal 1-7 September 2010 yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Kota Surakarta. Kegiatan ini bersamaan dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2010-2015.

Untuk sampel kedua diambil dari 115 orang atau masyarakat penerima manfaat dari pelaksanaan program MDG's yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan sampel di 5 (lima) kelurahan, yaitu: (i) Kec. Laweyan (Kel. Pajang); (ii) Kec. Serengan (Kel. Joyotakan); (iii) Kec. Pasar Kliwon (Kel. Semanggi); (iv) Kec. Jebres (Kel. Sewu); dan (v) Kec. Banjarsari (Kel. Keprabon). Sampel kedua ini dirangkum dan diringkas dari draf laporan hasil kajian yang dilakukan oleh Kemitraan untuk Integritas pada tahun 2012, dan telah disampaikan dalam acara *Focused Group Discussion* (FGD) di Omah Sinten Heritage Hotel and Resto pada Selasa, 29 Mei 2012, Jam: 09.00 - 12.30 WIB.

b. Profil Responden

Responden yang mewakili pemerintah Kota Surakarta berasal dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta dengan tidak menyertakan perwakilan dari SKPD kewilayahan (SKPD kecamatan dan SKPD kelurahan), yaitu: (i) Sekretariat Daerah; (ii) Sekretariat DPRD; (iii) Dinas Daerah (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Dinas Pengelolaan Pasar; Dinas Pertanian; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; serta Dinas Komunikasi dan Informatika); (iv) Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Lingkungan Hidup; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Penanaman Modal; dan Rumah Sakit Umum Daerah); (v) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan (vi) Satuan Polisi Pamong Praja. Gambaran dalam bentuk struktur organisasi di Kota Surakarta, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk responden kajian kinerja pelayanan publik yang terkait dengan pelaksanaan program-program MDG's, dikategorikan menjadi 4 (empat) sektor, yaitu: (i) Sektor Kemiskinan, (ii) Sektor Pendidikan, (iii) Sektor Kesehatan, dan (iv) Sektor Lingkungan Hidup. Dari 5 (lima) kelurahan yang menjadi sampel, dengan total sampel berjumlah 115 responden masyarakat penerima manfaat, dirinci: (i) Sektor Kemiskinan melibatkan sejumlah 33 responden, (ii) Sektor Pendidikan melibatkan sejumlah 27 responden, (iii) Sektor Kesehatan melibatkan sejumlah 30 responden, dan (iv) Sektor Lingkungan Hidup melibatkan sejumlah 25 responden. Gambaran wilayah administrasi di Kota Surakarta sebelum era pemekaran kelurahan yang dibagi ke dalam 5 (lima) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Metode Kajian

Untuk kajian yang diterapkan pada sampel yang berasal dari pemerintah (SKPD) dilakukan dengan model isian atas pertanyaan terbuka yang terkait dengan permasalahan dan kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan, yang dalam hal ini adalah dokumen Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang diajukan kepada 53 peserta pelatihan penyusunan dokumen Renstra-SKPD di Kota Surakarta pada 1-7

September 2010.

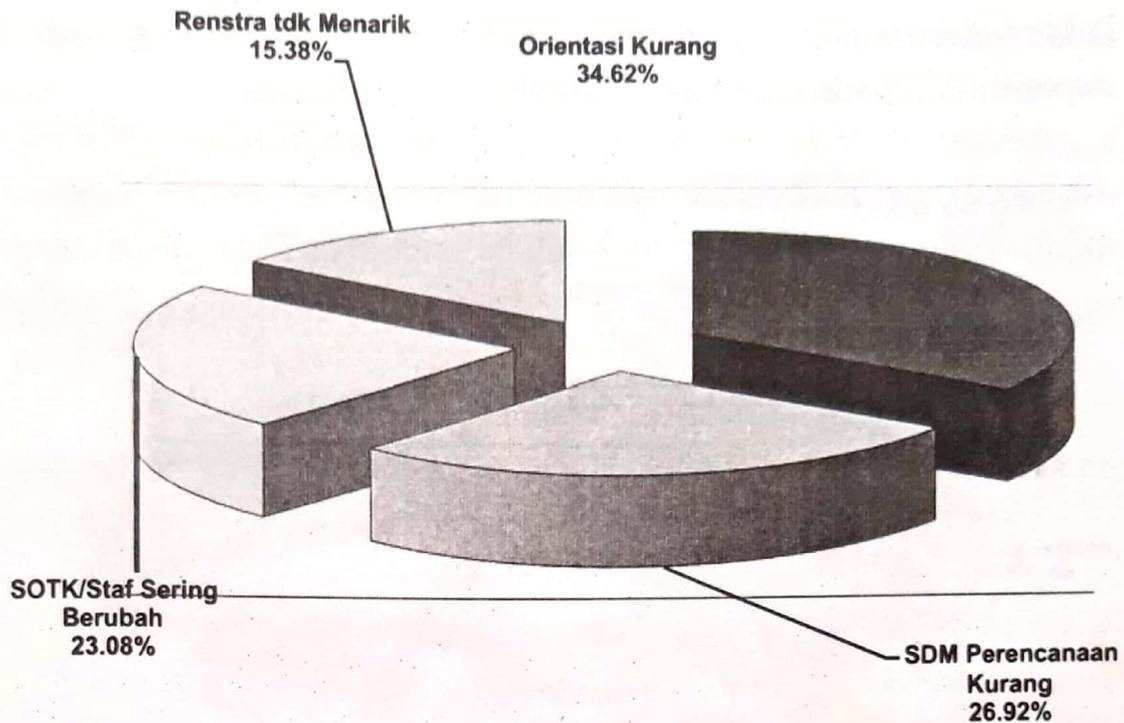
Untuk kajian yang terkait dengan penilaian kinerja pelayanan publik atas pelaksanaan program MDG's dilakukan dengan metode skor (*scoring method*), dengan rentang 1 (satu) sampai 4 (empat). Nilai 4 (empat) menunjukkan adanya pelayanan yang sangat baik (sangat memuaskan), nilai 3 (tiga) kategori pelayanan baik (memuaskan), nilai 2 (dua) kategori pelayanan kurang baik (kurang memuaskan), dan nilai 1 (satu) kategori pelayanan sangat kurang baik (sangat kurang memuaskan). Penilaian tingkat kepuasan, didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu: (i) aspek partisipasi (keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta tataran pelaksanaan program); (ii) aspek efisiensi (hasil program, luas cakupan program, dan kedalaman program); serta (iii) aspek efektivitas (ketepatan sasaran dan dampak program).

III. PEMBAHASAN

a. Dimensi Perencanaan

Dengan memisahkan jawaban atas permasalahan dan kendala dalam penyusunan dokumen Renstra-SKPD, seperti yang dapat dilihat dalam Lampiran 3, ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aspek pemahaman dasar dokumen perencanaan, aspek proses penyusunan dokumen, dan aspek pasca tersusunnya dokumen perencanaan; dapat diberikan beberapa penjelasan sebagai berikut.

Terkait dengan aspek pemahaman terhadap dokumen perencanaan, terdapat 4 (empat) permasalahan/kendala, yaitu: (i) Kurangnya penjelasan/orientasi Renstra-SKPD; (ii) Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusi (SDM) dalam memahami Renstra-SKPD; (iii) Seringnya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan mutasi pejabat/staf; dan (iv) Dokumen Renstra-SKPD tidak menarik untuk disusun. Gambaran secara grafis, selengkapny dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut.*)



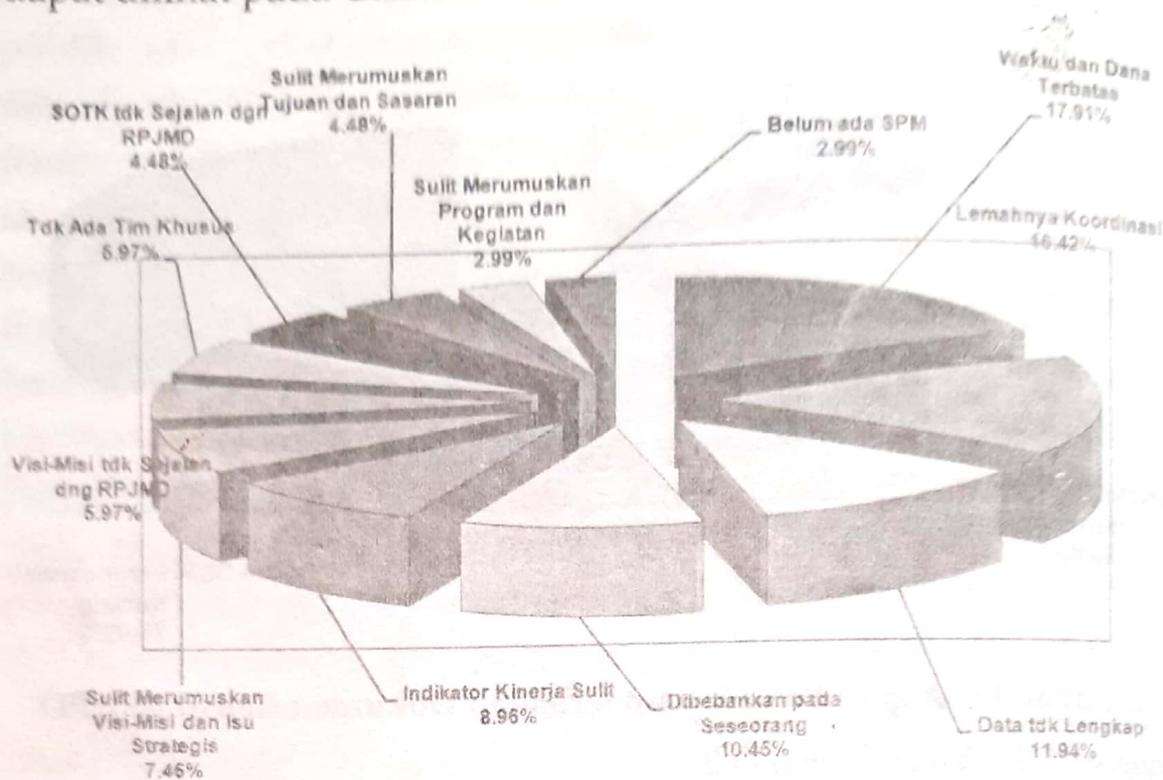
Gambar 3.1. Aspek Pemahaman terhadap Dokumen Renstra-SKPD

Sumber: Diolah dari Lampiran 3.

Dari Gambar 3.1. di atas dapat dilihat bahwa orientasi terhadap pemahaman dokumen perencanaan yang sangat kurang dengan besaran mencapai 34,62%; menjadi kendala utama SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan. Kondisi ini bisa menjadi preseden buruk bagi pelayanan birokrasi di Kota Surakarta. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pelayanan publik merupakan tindak lanjut dari baik dan tepatnya dokumen perencanaan yang memuat serangkaian program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD dalam memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat. Tidak baik dan tepatnya dokumen perencanaan akan mempunyai implikasi pada buruknya pelayanan kepada masyarakat di kemudian hari.

Dari aspek proses penyusunan dokumen, ada 12 (dua belas) permasalahan/kendala. Dari 12 (dua belas) permasalahan tersebut terdapat 5 (lima) besar permasalahan, yaitu: (i) Keterbatasan waktu dan dana untuk penyusunan dokumen; (ii) Lemahnya koordinasi antar unit kerja, baik dalam 1 (satu) SKPD maupun antar SKPD; (iii) Tidak lengkapnya Data Dasar (*Base Data*) di SKPD; (iv) Beban penyusunan masih pada orang-orang tertentu; serta (v) Kesulitan

dalam merumuskan indikator kinerja. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut. *)



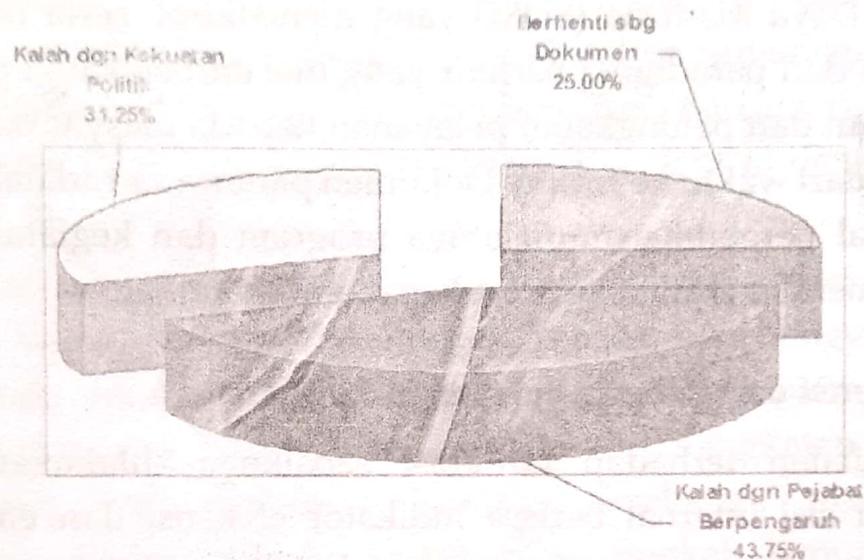
Gambar 3.2. Aspek Proses Penyusunan Dokumen Renstra-SKPD

Sumber: Diolah dari Lampiran 3

Dari Gambar 3.2. di atas dapat dilihat bahwa waktu dan dana menjadi kendala utama dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini membawa implikasi bahwa seolah-olah jika dana tidak tersedia dan tidak mencukupi bagi SKPD, maka tidak bisa dihasilkan dokumen perencanaan dengan kualitas yang baik. Padahal dengan gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang ini, seharusnya bukan menjadi alasan untuk tidak menghasilkan dokumen perencanaan dengan kualitas baik. Dokumen perencanaan seharusnya menjadi panduan kunci (*blue print*) bagi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada era otonomi sekarang ini, khususnya sebagai pegangan dan panduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap aspek pasca penyusunan dokumen Renstra-SKPD, terdapat 3 (tiga) permasalahan/kendala yaitu: (i) Pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen Renstra-SKPD sering dikalahkan oleh para pejabat yang mempunyai pengaruh kuat; (ii)

Manfaat dokumen Renstra-SKPD sering dikalahkan oleh kekuatan politik di legialatif (Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD); dan (iii) Dokumen Renstra-SKPD sering hanya berhenti sebagai buku / dokumen saja yang disimpan di rak-rak buku di lingkungan kantor SKPD. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.3. berikut. *)



Gambar 3.3. Aspek Keluaran / Pasca Penyusunan Dokumen Renstra-SKPD

Sumber: Diolah dari Lampiran 3

Dari Gambar 3.3. di atas dapat disimpulkan bahwa eksekutif (pemerintah daerah dan perangkatnya) dan unsur legislatif mempunyai peran besar dalam menjadikan dokumen perencanaan pembangunan akan dapat diimplementasikan atau tidak. Kemauan politik (*political will*) dari para pemimpin daerah, khususnya di Kota Surakarta sangat diperlukan untuk menciptakan tata biokrasi Pemda yang baik yang berlandaskan pada dokumen perencanaan yang baik dan akurat.

Di samping itu, untuk menciptakan birokrasi yang ideal pada era otonomi sekarang ini, juga perlu dilakukan langkah-langkah penguatan dalam bidang kewenangan/urusan, peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan program dan kegiatan, peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta peningkatan informasi manajemen yang akurat dan praktis, yang dapat dengan mudah

diakses oleh berbagai pihak terkait dan yang membutuhkan.

Pemda juga harus menyadari bahwa kualitas pelayanan publik seringkali dianggap sebagai cerminan dari kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi akan sangat terkait dengan ketersediaan sistem pemerintahan yang baik dan yang mendukung (termasuk kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi, serta pola pikir (*mindset*) dan paradigma berfikir yang melatarbelakangi perlunya pemberian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dari waktu ke waktu. Dokumen perencanaan adalah wadah bagi awal pergerakan munculnya program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

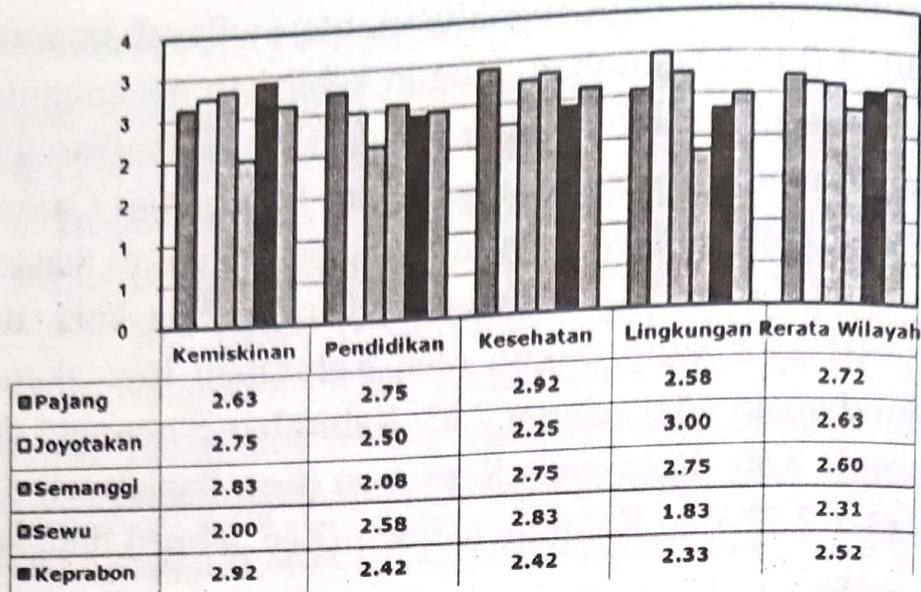
b. Dimensi dan Kinerja Pelayanan Publik

Penilaian terhadap birokrasi sebaiknya dilakukan, tidak saja dari sisi internal berupa indikator efisiensi dan efektivitas tetapi juga harus mencakup unsur layanan dari sisi eksternal (masyarakat pengguna layanan) berupa indikator tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan dan juga indikator akuntabilitas dan responsibilitas. Pelayanan yang diberikan kepada publik bisa berupa penggunaan fasilitas umum (jasa dan non jasa), pelayanan perizinan, distribusi barang publik yang bersifat pokok (air, listrik dan sebagainya), dan berbagai bentuk layanan lainnya yang mekanisme pengadaannya biasanya terkait dengan penggunaan anggaran publik (baca: APBN maupun APBD).

Kemitraan untuk Integritas (2012) telah mengadakan studi di Kota Surakarta dengan judul: Penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Masyarakat Dalam Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millennium (MDG's) di Kota Surakarta: Studi Kasus di Kelurahan Joyotakan, Keprabon, Semanggi, Pajang dan Sewu. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program pembangunan dan dampaknya di masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan kualitas kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Hasil secara ringkas dan dalam bentuk rangkuman, dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dari hasil kajian yang mengkaitkan antara wilayah sasaran yang mencakup 5 (lima) kelurahan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan kualitas kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup; dari Gambar 3.4 dapat dilihat bahwa secara rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di Kelurahan Pajang (Kec. Laweyan) yang paling baik, dengan nilai sebesar 2.72; yang diikuti oleh Kelurahan Joyotakan (Kec. Serengan) dengan nilai sebesar 2.63; Kelurahan Semanggi dengan nilai sebesar 2.60; Kelurahan Keprabon (Kec. Banjarsari) dengan nilai sebesar 2.52; dan Kelurahan Sewu (Kec. Jebres) dengan nilai sebesar 2.31.

Untuk gambaran kinerja masing-masing sektor, dari Gambar 3.4 juga dapat dilihat bahwa untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan, masyarakat di Kelurahan Keprabon paling tinggi nilai kepuasannya. Sedang untuk kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan kualitas kesehatan, masyarakat Kelurahan Pajang paling tinggi nilai tingkat kepuasannya. Terakhir, untuk kebijakan keberlanjutan lingkungan hidup, masyarakat Kelurahan Joyotakan mempunyai nilai tingkat kepuasan yang paling tinggi. Dari gambaran ini, pelajaran yang bisa dipetik, yaitu setiap wilayah mempunyai keunggulan sendiri-sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Para birokrat di Kelurahan Pajang bisa menjadi contoh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diindikasikan dari keunggulan di 2 (dua) sektor berada di kelurahan ini. *)

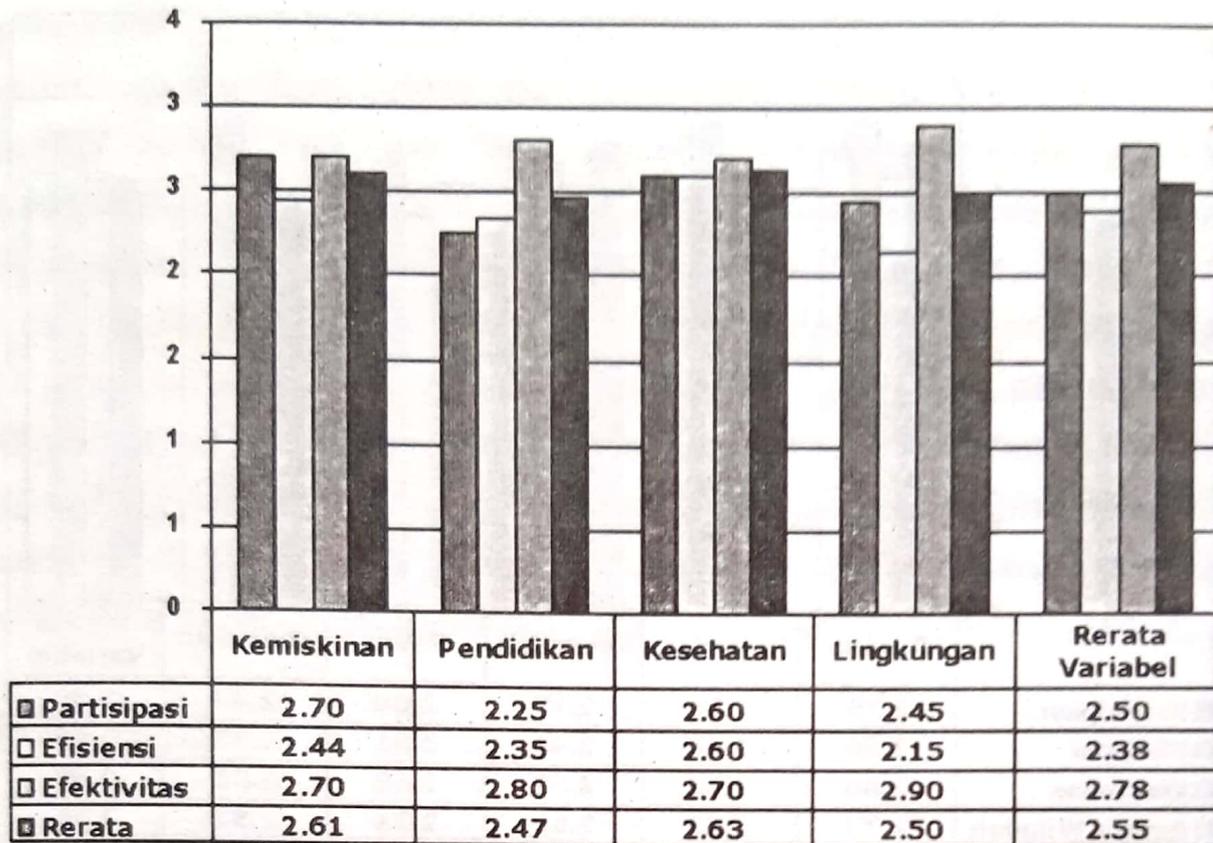


Gambar 3.4. Kinerja Pelayanan Publik Berdasar Wilayah dan Sektor Pembangunan

Sumber: Diolah dari Lampiran 4

Dari hasil kajian yang mengkaitkan antara aspek penilaian dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan kualitas kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup; dari Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa secara rata-rata variabel efektivitas (ketepatan sasaran dan dampak program) mempunyai nilai yang paling tinggi, yaitu sekitar 2.78; yang diikuti oleh variabel partisipasi dengan nilai sebesar 2.50; dan variabel efisiensi dengan nilai sebesar 2.38. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel efektivitas yang menyangkut ketepatan sasaran dan dampak program sudah berjalan mengungguli 2 (dua) variabel yang lain.

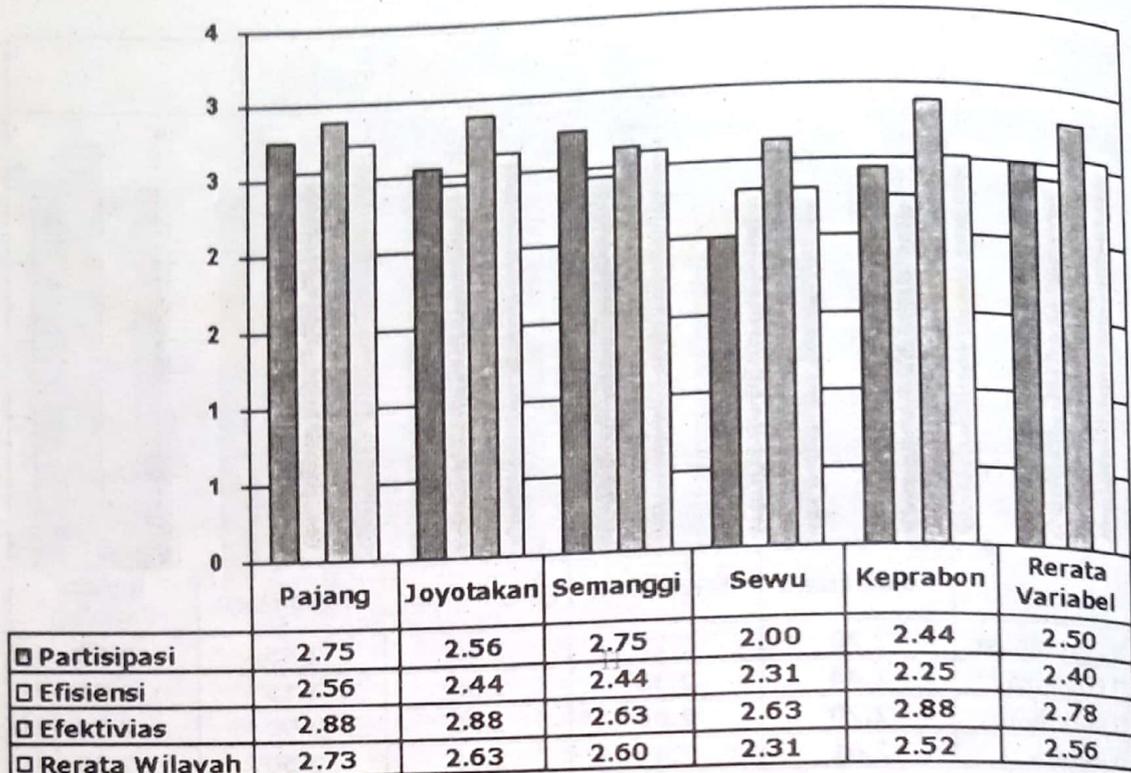
Efektivitas untuk kebijakan di sektor pendidikan dan lingkungan hidup mempunyai nilai yang cukup menonjol, yaitu sebesar 2.90 untuk sektor lingkungan hidup dan sebesar 2.80 untuk sektor pendidikan. Untuk sektor kemiskinan dan kesehatan mempunyai nilai yang sama, yaitu sebesar 2.70. Variabel / aspek efisiensi yang memuat komponen hasil program, luas cakupan program, dan kedalaman program; mempunyai nilai yang paling rendah di Sektor Lingkungan Hidup (nilai 2.15). Uraian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.5. berikut ini. *)



Gambar 3.5. Kinerja Pelayanan Publik Berdasar Variabel dan Sektor Pembangunan

Sumber: Diolah dari Lampiran 4.

Dari hasil kajian yang mengkaitkan antara aspek penilaian dengan lokasi pelayanan di 5 (lima) kelurahan; dari Gambar 3.6 dapat dilihat bahwa secara rata-rata variabel efektivitas (ketepatan sasaran dan dampak program) mempunyai nilai yang paling tinggi, yaitu sekitar 2.88 di 3 (tiga) kelurahan yaitu: (i) Kelurahan Pajang (Kec. Laweyan); (ii) Kelurahan Joyotakan (Kec. Serengan); dan Kelurahan Keprabon (Kec. Banjarsari). Sedang untuk Kelurahan Semanggi (Kec. Pasar Kliwon) dan Kelurahan Sewu (Kec. Jebres) mempunyai nilai sama, yaitu sebesar 2.63. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.6. berikut ini. *)



Gambar 3.6. Kinerja Pelayanan Publik Berdasar Variabel dan Wilayah
 Sumber: Diolah dari Lampiran 4.

Dari serangkaian penjelasan di atas, maka upaya penciptaan model birokrasi yang baik dan ideal yang disertai dengan penciptaan pelayanan yang semakin prima kepada masyarakat, harus ada perubahan paradigma birokrasi, yaitu: (i) dari pola dan perilaku birokrasi 'yang minta dilayani oleh masyarakat' menjadi 'keinginan untuk melayani kepentingan masyarakat'; (ii) dari pola dan perilaku birokrasi 'yang menghambat kegiatan masyarakat' menjadi 'upaya untuk memperlancar urusan masyarakat'; (iii) dari pola dan perilaku birokrasi 'yang mempersulit dan memperumit urusan masyarakat' menjadi 'upaya untuk mempermudah setiap urusan yang diajukan oleh masyarakat'; serta (iv) dari pola dan perilaku birokrasi 'yang bersifat tertutup' menjadi 'model birokrasi yang terbuka/transparan dan akuntabel'.

Berdasar pada pola di atas, maka paradigma birokrasi yang sekarang harus diarahkan dari pola penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada pemerintah harus berubah dan bergeser ke pola pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, perangkat birokrasi di daerah (khususnya di Kota Surakarta) harus diberi

pengertian dan kesadaran bahwa memberikan pelayanan yang terbaik merupakan cermin dari semangat pengabdian. Pelayanan publik harus baik dan berkualitas, karena pelayanan publik merupakan jembatan antara Pemda (aparatur birokrasi) dengan masyarakat. Pemda perlu dan sebaiknya terus mendengarkan suara publik, sehingga akan tercipta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam peningkatan pelayanan publik yang berkualitas di daerah. Kinerja birokrasi dapat dinilai, salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan publik telah diberikan dan diciptakan untuk masyarakatnya.

IV. PENUTUP

a. Implementasi Kebijakan

- Di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan FX. Hadi Rudyatmo (Rudy) selama 2 (dua) periode 2005-2010 (Periode Pertama) dan periode 2010-2015 (Periode Kedua), pembangunan di Kota Surakarta mengalami kemajuan yang begitu pesat; khususnya kemajuan pembangunan fisik yang mendukung keberadaan sektor jasa (sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan dan perbankan; serta sektor jasa lainnya). Kemajuan ini akan menjadi berkelanjutan jika didukung pula dengan kemajuan pembangunan pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, baik SDM aparatur Pemda maupun SDM masyarakat kota Surakarta.
- SDM aparatur dan SDM masyarakat akan menjadi daya dukung pembangunan daerah, jika seorang pemimpin mampu mensinergikan dua kekuatan SDM tersebut dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berawal / bermula dari permasalahan yang terjadi di masyarakat kota, yang kemudian dikerangkakan melalui dokumen perencanaan (*planning documents*) dan dokumen penganggaran (*budgetting documents*) Kota Surakarta. Dokumen perencanaan pembangunan di Kota Surakarta sudah tersedia, mulai dari

dokumen RPJPD (20 tahun); dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD (5 tahun), dan juga dokumen RKPD dan Renja-SKPD (1 tahun). Sedang untuk dokumen penganggaran yang semuanya berjangka waktu 1 tahun juga terus dilaksanakan, yaitu dari dokumen KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD hingga dokumen DPA-SKPD.

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai manifestasi demokrasi lokal harus bermula pada tingkat kelurahan (Musrenbangkel), yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan (Musrenbangcam) dan berakhir di tingkat kota (Musrenbangkot). Interaksi antar Pemerintah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui berbagai forum tersebut, diharapkan bisa memberikan penguatan pada aspek perencanaan pembangunan (*planning aspects*) dan kemudian dapat diimplementasikan dalam seperangkat dokumen penganggaran (*budgetting aspects*).
- Interaksi aparatur Pemda dan masyarakat terjalin sejak penyelenggaraan musyawarah di tingkat kelurahan (Musrenbangkel), yang dilanjutkan ke musyawarah di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) dan berakhir dengan penyelenggaraan musyawarah di tingkat kota (Musrenbangkot). Pertaruhan dan iklim demokratisasi lokal berada di ranah ini. Kualitas demokrasi lokal pada tahapan ini, akan menentukan kualitas hasil dalam wujud pelayanan publik yang telah menjadi kesepakatan bersama. Semua komponen dan pemangku kepentingan hendaknya ikut mengawal proses ini, sekaligus memantau jalannya hasil kesepakatan dalam bentuk implementasinya, sekaligus ikut terlibat dalam proses *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Kota Surakarta.
- Pada era pemerintahan sebelum Jokowi-Rudi telah terbit Keputusan Walikota Surakarta No.3/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun, dan Musyawarah Kota Membangun. Tradisi yang sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2001, hendaknya menjadi pangkal tolak untuk terus menciptakan demokratisasi tingkat lokal di Kota Surakarta yang semakin hari seharusnya semakin membaik. Demokratisasi lokal harus dapat dijadikan sarana dan pijakan dalam menuju ke arah pembangunan yang semakin membaik bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Berbagai organ dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kota Surakarta harus bisa bersinergi, baik dalam upaya memecahkan permasalahan di tingkat sektoral (permasalahan umum kota: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya) maupun permasalahan di tingkat regional (permasalahan tingkat kecamatan dan kelurahan). Oleh karena basis pelayanan masyarakat berada pada tingkat pemerintahan yang paling rendah (kelurahan), maka pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sebaiknya dapat dijalin dan dibina dengan baik mulai pada tahapan ini.

b. Beberapa Simpulan

- Birokrasi lebih ditekankan pada unit / organ beserta aparturnya, sementara pelayanan publik lebih condong pada tindakan yang dilakukan oleh aparatur Pemda sebagai manifestasi atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) aparatur Pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Salah satu cara untuk melihat struktur birokrasi di Kota Surakarta, antara lain dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kota Surakarta, dan juga penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari setiap organ/lembaga yang ada di Kota Surakarta dalam Peraturan Walikota (Perwali). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta, sebaiknya tahu dan memahami isi dari Perda maupun

Perwali tersebut, serta berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa menerapkannya di masyarakat dalam wujud pemberian pelayanan yang optimal, yang didahului dengan upaya pembuatan dokumen perencanaan yang baik dan akurat, disertai dengan upaya pelibatan aktif dari masyarakat.

- Dalam menuju ke arah pembangunan yang semakin berhasil di Kota Surakarta, maka sudut pandang birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus bergeser ke orientasi kepuasan pelanggan/masyarakat. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek dan bidang pembangunan harus mendapatkan tempat, sebagai bagian dari umpan balik (*feedback*) adanya interaksi antar aparatur Pemda dengan masyarakat.
- Keberhasilan Pemda pada era otonomi sekarang ini, salah satu indikator atau tolok ukur yang menjadi acuannya adalah semakin meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Surakarta harus bisa mengimplementasikan indikator ini, dengan harapan agar proses pembangunan yang sebagian besar menggunakan dana publik, dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kategori miskin dan sedang terpinggirkan oleh pesatnya kemajuan pembangunan di Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surakarta (2009). *Kota Surakarta Dalam Angka 2009*. Surakarta: BPS dan Bappeda.

Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt. (2003). *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E Sharpe Inc.

Lalu Said Ruppina. (2005). *Menuju Demokrasi Pemerintahan: Bunga Rampai Masalah Otonomi Daerah, Akuntabilitas Pemerintahan, Demokrasi dan Sosial Budaya*, Cetakan Pertama. Mataram: Universitas Mataram Press.

Kemitraan untuk Integritas. (2012). *Penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Masyarakat Dalam Percepatan Pencapaian Target*

Pembangunan Millennium (MDG's) di Kota Surakarta: Studi Kasus di Kelurahan Joyotakan, Keprabon, Semanggi, Pajang dan Sewu. Draf Laporan Hasil. Surakarta: Kemitraan untuk Integritas.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Membangun, Musyawarah Kecamatan Membangun, dan Musyawarah Kota Membangun.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Syaiful Arif (Penyunting). (2008). *Reformsai Pelayanan Publik*, Cetakan I. Malang: Averroes Press.

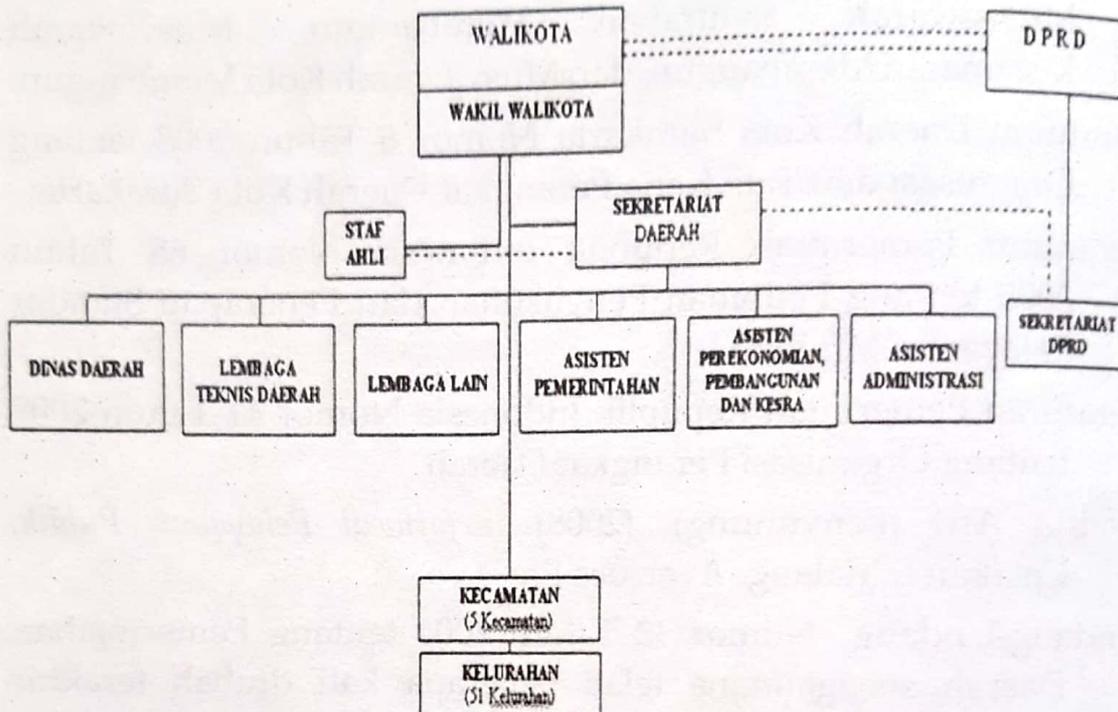
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Bagan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta



Catatan:

- 1) **Dinas Daerah**, mencakup: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pengelolaan Pasar; Dinas Pertanian; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2) **Lembaga Teknis Daerah**, mencakup: Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan Lingkungan Hidup; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Penanaman Modal; dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Sumber: Lampiran I, Perda No.6/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Lampiran 2:

Tabel 1
Luas Wilayah Berdasar Kecamatan dan Kelurahan di Kota
Surakarta, Sebelum adanya Pemekaran
(dalam Km2 dan Persen)

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah	
		Dalam Km2	Dalam Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Kecamatan Laweyan	8.638	19.61
01.01.	Kel. Pajang	1.553	3.53
01.02.	Kel. Laweyan	0.248	0.56
01.03.	Kel. Bumi	0.373	0.85
01.04.	Kel. Panularan	0.544	1.24
01.05.	Kel. Penumping	0.503	1.14
01.06.	Kel. Sriwedari	0.513	1.16
01.07.	Kel. Purwosari	0.843	1.91
01.08.	Kel. Sondakan	0.785	1.78
01.09.	Kel. Kerten	0.921	2.09
01.10.	Kel. Jajar	1.055	2.40
01.11.	Kel. Karengasem	1.300	2.95
02.	Kecamatan Serengan	3.194	7.25
02.01.	Kel. Joyotakan	0.459	1.04
02.02.	Kel. Danukusuman	0.508	1.15
02.03.	Kel. Serengan	0.640	1.45
02.04.	Kel. Tipes	0.640	1.45
02.05.	Kel. Kratonan	0.324	0.74
02.06.	Kel. Jayengan	0.293	0.67
02.07.	Kel. Kemlayan	0.330	0.75
03.	Kecamatan Pasar Kliwon	4.815	10.93
03.01.	Kel. Joyosuran	0.540	1.23
03.02.	Kel. Semanggi	1.668	3.79
03.03.	Kel. Pasar Kliwon	0.360	0.82
03.04.	Kel. Gajahan	0.339	0.77
03.05.	Kel. Baluwarti	0.407	0.92
03.06.	Kel. Kampung Baru	0.306	0.69
03.07.	Kel. Kedung Lumbu	0.551	1.25
03.08.	Kel. Sangkrah	0.452	1.03
03.09.	Kel. Kauman	0.192	0.44
04.	Kecamatan Jebres	12.582	28.57
04.01.	Kel. Kepatihan Kulon	0.175	0.40

No.	Kecamatan dan Keluarahan	Luas Wilayah	
		Dalam Km2	Dalam Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
04.02.	Kel. Kepatihan Wetan	0.225	0.51
04.03.	Kel. Sudiroprajan	0.230	0.52
04.04.	Kel. Gandekan	0.350	0.79
04.05.	Kel. Sewu	0.485	1.10
04.06.	Kel. Pucang Sawit	1.270	2.88
04.07.	Kel. Jagalan	0.650	1.48
04.08.	Kel. Purwodiningratan	0.373	0.85
04.09.	Kel. Tegalharjo	0.325	0.74
04.10.	Kel. Jebres	3.170	7.20
04.11.	Kel. Mojosongo	5.329	12.10
05.	Kecamatan Banjarsari	14.811	33.63
05.01.	Kel. Kadipiro	5.088	11.55
05.02.	Kel. Nusukan	2.063	4.68
05.03.	Kel. Gilingan	1.272	2.89
05.04.	Kel. Stabelan	0.277	0.63
05.05.	Kel. Kestalan	0.208	0.47
05.06.	Kel. Keprabon	0.318	0.72
05.07.	Kel. Timuran	0.315	0.72
05.08.	Kel. Ketelan	0.250	0.57
05.09.	Kel. Punggawan	0.360	0.82
05.10.	Kel. Mangkubumen	0.797	1.81
05.11.	Kel. Manahan	1.280	2.91
05.12.	Kel. Sumber	1.333	3.03
05.13.	Kel. Banyuanyar	1.250	2.84
	5 Kecamatan, 51 Kelurahan	44.040	100.00

Sumber: BPS dan Bappeda Kota Surakarta (2009). Kota Surakarta Dalam Angka 2009.

Lampiran 3:

Tabel 2
Hasil Tabulasi Aspek-aspek dalam Penyusunan Dokumen
Renstra-SKPD Kota Surakarta Tahun 2010

No.	Aspek Penyusunan Dokumen RENSTRA-SKPD	Frekuensi	Persentase	
			Parsial	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pemahaman Dasar Dokumen	26	100.00	28.26
	01. Kurangnya penjelasan / orientasi Renstra-SKPD	9	34.62	9.78
	02. Lemahnya kemampuan SDM dalam memahami Renstra	7	26.92	7.61
	03. Seringnya perubahan SOTK dan mutasi pejabat/staf	6	23.08	6.52
	04. Dokumen Renstra tidak menarik untuk disusun	4	15.38	4.35
B.	Proses Penyusunan Dokumen	67	100.00	72.83
	01. Keterbatasan waktu dan dana untuk penyusunan dok.	12	17.91	13.04
	02. Lemahnya koordinasi antar unit dalam 1 SKPD	11	16.42	11.96
	03. Tidak lengkapnya Data Dasar (<i>Base Data</i>) di SKPD	8	11.94	8.70
	04. Beban penyusunan masih pada orang-orang tertentu	7	10.45	7.61
	05. Kesulitan dalam merumuskan indikator kinerja	6	8.96	6.52
	06. Kesulitan perumusan Visi-Misi dan Isu-isu Strategis	5	7.46	5.43
	07. Visi-Misi Renstra tidak sejalan dengan dok. RPJMD	4	5.97	4.35
	08. Tidak adanya Tim khusus untuk menyusun dok.	4	5.97	4.35
	09. Kondisi SOTK tidak sejalan dengan dok. RPJMD	3	4.48	3.26
	10. Kesulitan dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran	3	4.48	3.26
	11. Kesulitan dalam menurunkan program dan kegiatan	2	2.99	2.17
	12. Belum adanya SPM untuk masing-masing SKPD	2	2.99	2.17
C.	Pasca Penyusunan Dokumen	16	100.00	17.39
	01. Manfaat dok. Renstra dikalahkan oleh kekuatan politik	5	31.25	5.43
	02. Dokumen Renstra berhenti hanya sebagai buku / dok.	4	25.00	4.35
	03. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra dikalahkan oleh pejabat yang berpengaruh kuat	7	43.75	7.61
	Total Aspek Penyusunan RENSTRA-SKPD	92		100.00

Sumber: Hasil pengolahan jawaban atas pertanyaan terbuka terkait dengan permasalahan dan kendala dalam penyusunan dokumen Renstra-SKPD dari 53 peserta pelatihan penyusunan dokumen Renstra-SKPD di Kota Surakarta, 1-7 September 2010.

Lampiran 4

Potret Kinerja Pelayanan Publik Bidang MDGs di 5 (Lima) Kelurahan di Kota Surakarta Tahun 2012

No. Sektor MDGs	Kec. Laweyan		Kec. Serengan		Kec. Pasar Kliwon		Kec. Jebres		Kec. Banjarsari		Rerata Total	
	Kel. Pajang		Kel. Joyotakan		Kel. Semanggi		Kel. Sewu		Kel. Keprabon			
	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank	Nilai	Rank
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
01. Kemiskinan	N = 5		N = 5		N = 7		N = 6		N = 10		N = 33	
a. Partisipasi	2.75	1	2.75	2	3.00	1	2.00	1	3.00	1	2.70	1
b. Efisiensi	2.75	1	2.50	3	2.50	2	2.00	1	2.75	2	2.44	2
c. Efektivitas	2.50	2	3.00	1	3.00	1	2.00	1	3.00	1	2.70	1
Rerata	2.63	(4)	2.75	(3)	2.83	(2)	2.00	(5)	2.92	(1)	2.61	
02. Pendidikan	N = 5		N = 4		N = 5		N = 4		N = 9		N = 27	
a. Partisipasi	3.00	1	2.25	2	2.25	1	1.75	2	2.00	3	2.25	3
b. Efisiensi	2.25	2	2.25	2	2.00	2	3.00	1	2.25	2	2.35	2
c. Efektivitas	3.00	1	3.00	1	2.00	2	3.00	1	3.00	1	2.80	1
Rerata	2.75	(1)	2.50	(3)	2.08	(5)	2.58	(2)	2.42	(4)	2.47	
03. Kesehatan	N = 10		N = 6		N = 7		N = 7		N = -		N = 30	
a. Partisipasi	2.75	2	2.25	2	2.75	2	2.75	2	2.50	1	2.60	2
b. Efisiensi	3.00	1	2.00	3	3.00	1	2.75	2	2.25	2	2.60	2
c. Efektivitas	3.00	1	2.50	1	2.50	3	3.00	1	2.50	1	2.70	1
Rerata	2.92	(1)	2.25	(5)	2.75	(3)	2.83	(2)	2.42	(4)	2.63	
04. Lingkungan	N = 6		N = 6		N = 6		N = -		N = 7		N = 25	
a. Partisipasi	2.50	2	3.00	1	3.00	1	1.50	2	2.25	2	2.45	2

b. Efisiensi	2.25	3	3.00	1	2.25	2	1.50	2	1.75	3	2.15	3
c. Efektivitas	3.00	1	3.00	1	3.00	1	2.50	1	3.00	1	2.90	1
Rerata	2.58	(3)	3.00	(1)	2.75	(2)	1.83	(4)	2.33	(4)	2.50	
Rerata Total Kel.	2.73	(1)	2.63	(2)	2.60	(3)	2.31	(5)	2.52	(4)		
Rerata Total Sektor	N = 26		N = 21		N = 25		N = 17		N = 26		N = 115	
a. Partisipasi	2.50	(2)	b. Efisiensi		2.38	(3)	c. Efektivitas		2.78	(1)		

Sumber: Kemitraan untuk Integritas. (2012). *Penilaian Kinerja Pelayanan Publik oleh Masyarakat Dalam Percepatan Pencapaian Target Pembangunan Millennium (MDG's) di Kota Surakarta: Studi Kasus di Kelurahan Joyotakan, Keprabon, Semanggi, Pajang dan Sewu. (Draf Laporan Hasil). Format Tampilan diolah kembali.*



Jl. Aster IV No.2 RT 02 RW 01 Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131
Telp/fax: 0271-720842
Email: konsorsiumsolo@soloku.org
www.soloku.org